

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Paguyuban Podomoro di Desa Larangan, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah, memiliki anggota dari berbagai latar belakang jaringan terorisme mulai dari Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, JAD yang terafiliasi dengan ISIS, hingga mantan anggota FPI yang akan melakukan aksi meledakan kantor Kepolisian.

Mantan anggota napiter ini memiliki sejumlah motif bergabung menjadi anggota Podomoro meliputi: *Pertama*, motif ekonomi, yakni dengan menjadi anggota Podomoro mendapatkan penghasilan dari bekerja di unit usaha Paguyuban Podomoro berupa wisata dan kuliner. Sebab mantan napiter ini sulit mendapatkan pekerjaan, selain karena kekhawatiran masyarakat juga mereka tidak memiliki identitas kependudukan yang dicabut sejak ditangkap oleh aparat keamanan.

*Kedua*, motif memulihkan nama baik, dan pengakuan dari negara. Yakni mantan napiter yang bergabung setelah mendapatkan program deradikalisasi akan mendapatkan kartu identitas kependudukan (E-KTP, Kartu Keluarga), jaminan sosial (BPJS Kesehatan) dan surat ijin mengemudi (SIM). Kartu yang didapatkan ini menandakan mereka sudah diterima oleh Pemerintah dan negara. *Ketiga*, motif memperbaiki diri, dengan bergabung Podomoro memiliki komunitas atau kelompok yang selalu menjaga agar tidak bergabung kembali dengan jaringan sebelumnya.

Sedangkan harapan anggota Podomoro setelah bergabung dalam paguyuban ini meliputi: *Pertama*, ingin mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang lebih baik. *Kedua*, ingin diakui atau diterima kembali oleh masyarakat. *Ketiga*, memperbaiki diri dan proses pertobatan setelah melakukan aksi terorisme.

Proses deradikalisasi di Podomoro, berbeda dengan sejumlah proses deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Proses deradikalisasi ini disusun oleh mantan napiter, dengan pendekatan komunikasi persuasif dan komunikasi dalam kelompok. Dalam komunikasi persuasif dan komunikasi kelompok, Wartoyo dan Ahmad Ismi merupakan komunikator utama sekaligus sebagai pemimpin dalam Paguyuban Podomoro.

Dalam menjalankan deradikalisasi yang selain penggunaan komunikasi persuasif di dalam kelompok, keberhasilan lainnya didukung dengan sejumlah faktor yakni: *Pertama*, pemulihan nama baik. Proses deradikalisasi pengurus Paguyuban Podomoro akan mengembalikan atau pemulihan nama baik dari anggotanya serta pengakuan dari Pemerintah. Berupa mendapatkan kembali kartu identitas diri, jaminan sosial, hingga mendapatkan SIM. Sebelumnya mereka pada saat bergabung dengan jaringan terorisme dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Pemerintah mencabut semua identitas diri, jaminan sosial hingga SIM.

*Kedua*, anggota Podomoro mendapatkan pekerjaan, di saat masyarakat takut terhadap mantan napiter. Selain itu tidak memiliki identitas diri, serta tidak memiliki modal usaha. Mendapatkan pekerjaan, menjadi daya tarik untuk bergabung dalam proses deradikalisasi di Podomoro. Proses deradikalisasi dilakukan dengan pembauran sosial, antara anggota Podomoro dengan masyarakat umum.

*Ketiga*, adanya pengawasan bersama, dan adanya proses dialektika anggota Podomoro yang setara, bahkan melibatkan masyarakat umum dalam pengawasan. Selain itu, penggunaan media untuk menerima perbedaan dan paham dilakukan di Podomoro, mulai dari musik hingga melaksanakan tugas penjagaan di wahana wisata yang dianggap melanggar syariat Islam bagi penganut Islam radikal.

*Keempat*, faktor teman sebaya, yakni adanya teman sebaya yang berasal dari kalangan mantan napiter sebagai orang yang melakukan proses deradikalisasi. Selain itu anggota Podomoro saling memberikan pengetahuan dan mengembalikan pemahaman radikal kepada pemahaman yang toleran atau kembali pada pemahaman Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta sehingga pemahaman ini diterima oleh umat Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **5.2. Saran dan Rekomendasi**

Pada akhirnya rangkaian penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat mendapat gelar magister ilmu komunikasi. Selanjutnya peneliti memberi saran atau rekomendasi terhadap berbagai pihak, yakni:

1. Penelitian ini dapat diteruskan atau disempurnakan, terkait program dan model deradikalisasi kepada mantan pelaku terorisme. Agar kasus terorisme di

Indonesia, maupun dunia dapat dikurangi bahkan dihilangkan dari hasil sejumlah penelitian yang dilakukan oleh peneliti maupun peneliti lainnya. Melalui pendekatan penelitian komunikasi persuasif, maupun komunikasi kelompok.

2. Kepada Pemerintah, Kepolisian, Kementerian Agama dan pihak-pihak lainnya dalam melakukan program deradikalisasi tidak harus memaksakan program mereka. Namun seharusnya menggali keinginan, atau bahkan memberikan kesempatan kepada narapidana maupun mantan narapidana untuk melaksanakan program deradikalisasi. Pemerintah dan pihak-pihak lainnya memberikan fasilitas, dukungan dana, tempat dan lainnya.
3. Dalam melakukan deradikalisasi, sebaiknya bukan pada tataran teoritis tanpa memberikan solusi hidup seperti mendapatkan penghasilan, atau pekerjaan bagi mantan pelaku teror harus lebih diutamakan. Sebelum melakukan program deradikalisasi yang bersifat, pengembalian pemahaman radikal menjadi pemahaman yang toleran. Seperti model pemberdayaan yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam program deradikalisasi di Podomoro, menjadi contoh baik dan tepat untuk melakukan program ini. Sehingga seharusnya program seperti ini bisa lebih banyak dikembangkan di tempat atau di wilayah lainnya, khususnya yang dicap sebagai kantor terorisme di Indonesia.
4. Pembauran sosial sebaiknya dilakukan pada setiap program deradikalisasi sehingga tercipta interaksi dan dialektika dari berbagai komponen. Mulai dari mantan teroris, dengan masyarakat umum. Dengan tujuan menghilangkan rasa curiga, dan mempercepat reunifikasi di dalam masyarakat.